

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan dan pertumbuhan pada suatu daerah merupakan pencapaian dan kemandirian daerah tersebut dalam mengurus daerahnya sendiri. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat. Pembangunan yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu daerah dalam membangun daerahnya. Kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas yang diberikan kepada masyarakat baik dalam segi kesehatan, pendidikan, transportasi, serta layanan publik akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga menggambarkan bahwa daerah tersebut sudah dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya.

Mewujudkan pembangunan daerah yang di mana merupakan bagian dari pembangunan nasional ini memerlukan dana yang cukup besar. Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya sehingga diberlakukannya otonomi daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berarti setelah diberlakukannya undang-undang tersebut, maka daerah harus dapat mengatur dan mengurus sendiri segala kepentingan yang berkaitan dengan daerahnya. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah karena telah diberlakukannya Otonomi Daerah maka, masing-masing daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya guna dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah agar masyarakatnya sejahtera terutama dalam segi kualitas layanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu indikator dalam

pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi pemerintah pusat agar terwujud otonomi daerah yang mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Demikian sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah belum maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat bergantung pada Pemerintah Daerah sejak adanya Otonomi Daerah.

Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan kota terbesar kedua di Sumatera harusnya dapat menggali segala potensi dari sumber-sumber kekayaan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Berikut data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2015	74.954.418.202.106	73.692.650.592.821
2016	84.057.230.609.931	78.134.693.571.523
2017	109.930.896.784.103	109.170.460.585.490
2018	110.050.515.570.004	95.325.761.213.074
2019	130.000.000.000.000	107.624.589.678.651

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Palembang (2020)  
(data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, penguatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2015-2018 terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 yaitu tidak tercapai sesuai target. Untuk lebih mengoptimalkan pemunutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber utama atau kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan sumber-sumber lainnya. Dari sini disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat penting bagi peningkatan pendapatan suatu daerah. Hal ini menyebabkan perlu ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah itu sendiri yaitu dengan pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Segala potensi penerimaan pajak di Kota Palembang harusnya bisa ditingkatkan lagi demi kontribusi yang lebih tinggi terhadap pendapatan daerah, apalagi di kota ini sendiri sudah banyak berdirinya usaha-usaha yang dapat dikenakan sebagai objek pajak.

Pajak daerah harus diperhatikan pencapaiannya, apakah mencapai target atau tidak, agar pada tahun mendatang dapat dilakukan evaluasi atau perbaikan supaya mencapai target dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya potensi daerah di Kota Palembang bisa dimaksimalkan lagi agar dapat menambah atau memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Sehingga, perlu dianalisis Efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang dan seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas hal ini yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengambil penelitian berjudul “ **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2015-2019**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran di Kota Palembang tahun 2015-2019.
- b. Bagaimana kontribusi pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2015-2019.

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya pada Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2015-2019.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran Kota Palembang tahun 2015-2019.
- b. Menganalisis kontribusi pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2015-2019.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah khasanah keilmuan bagi penulis dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah di Kota Palembang, khususnya pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi Pajak Daerah Kota Palembang dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran.
- c. Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi pembaca agar penelitian-penelitian selanjutnya tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah.